

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Komunikasi

2.1.1. Pengertian Komunikasi

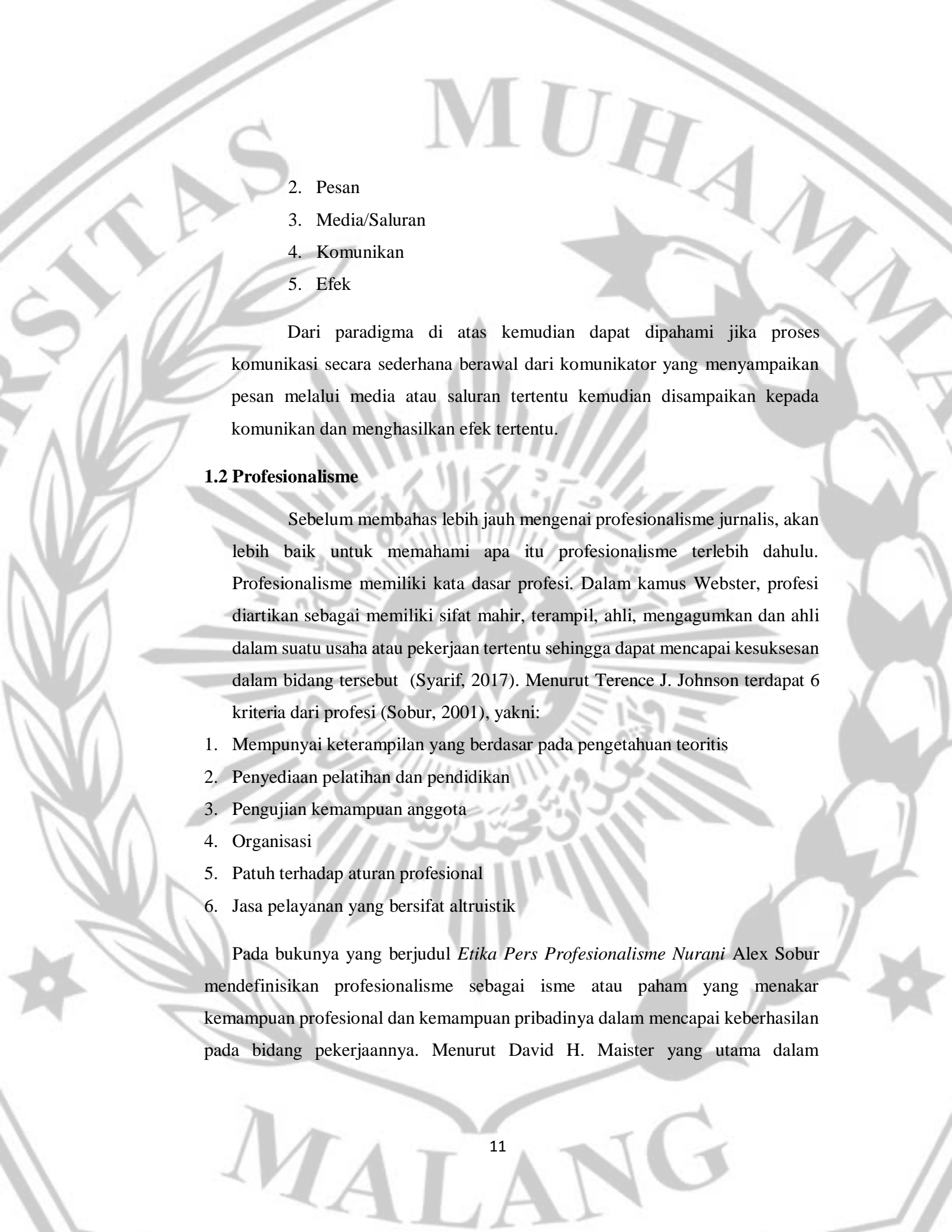
Dasar kata komunikasi yaitu *communico* (berbagi). Kata tersebut kemudian berkembang ke dalam bahasa latin yakni *communicatio* (pemberitahuan atau pertukaran). Sedangkan kata sifatnya yakni *communis* yang bermakna umum atau bersama-sama.

Setiap ahli mendefinisikan komunikasi dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan ilmu yang dikembangkan dari beberapa ilmuwan dengan disiplin ilmu yang beragam. Beberapa definisi komunikasi dari para ahli itu salah satunya yakni oleh Shannon dan Weaver (1949) mendefinisikan komunikasi sebagai bentuk interaksi yang mempengaruhi antar manusia, sengaja ataupun tidak dan tidak terbatas hanya dalam bentuk verbal saja tetapi bisa dari ekspresi wajah, teknologi seni (Wiyanto, 2004).

Paradigma komunikasi milik Harold D. Lasswell sendiri kerap digunakan oleh ahli komunikasi. Menurut Lassweell menjelaskan komunikasi yang elok yaitu *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa).

Dari paradigma tersebut kemudian dapat menunjukkan lima unsur dari komunikasi yakni:

1. Komunikator

- 
2. Pesan
 3. Media/Saluran
 4. Komunikan
 5. Efek

Dari paradigma di atas kemudian dapat dipahami jika proses komunikasi secara sederhana berawal dari komunikator yang menyampaikan pesan melalui media atau saluran tertentu kemudian disampaikan kepada komunikan dan menghasilkan efek tertentu.

1.2 Profesionalisme

Sebelum membahas lebih jauh mengenai profesionalisme jurnalis, akan lebih baik untuk memahami apa itu profesionalisme terlebih dahulu. Profesionalisme memiliki kata dasar profesi. Dalam kamus Webster, profesi diartikan sebagai memiliki sifat mahir, terampil, ahli, mengagumkan dan ahli dalam suatu usaha atau pekerjaan tertentu sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut (Syarif, 2017). Menurut Terence J. Johnson terdapat 6 kriteria dari profesi (Sobur, 2001), yakni:

1. Mempunyai keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis
2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan
3. Pengujian kemampuan anggota
4. Organisasi
5. Patuh terhadap aturan profesional
6. Jasa pelayanan yang bersifat altruistik

Pada bukunya yang berjudul *Etika Pers Profesionalisme* Nurani Alex Sobur mendefinisikan profesionalisme sebagai isme atau paham yang menakar kemampuan profesional dan kemampuan pribadinya dalam mencapai keberhasilan pada bidang pekerjaannya. Menurut David H. Maister yang utama dalam

profesionalisme yakni masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi (Andrias, 2004).

Richard Hall sendiri menggunakan konsep profesionalisme untuk menakar cara pandang seorang profesional terhadap profesinya. Hal tersebut menjadi cerminan dari tindakan dan perilaku mereka. Tindakan dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Di mana tindakan yang dilakukan oleh seorang profesional merupakan cerminan dari perilaku yang ditunjukkan, begitu pula sebaliknya (Sobur, 2001). Sementara itu, para sosiolog menyarankan lima struktur sikap profesionalisme yang menjadi rujukan bagi profesi apapun, kelima hal tersebut adalah (Sobur, 2001):

1. Organisasi atau kelompok sosial digunakan oleh profesional sebagai kelompok referensi utama. Bidang tugas merupakan bentuk kesetiaan dari seorang profesional.
2. Profesional akan mengutamakan kepentingan umum dengan melayani masyarakat. Dengan tujuan untuk dapat melayani masyarakat dengan baik.
3. Seorang profesional peduli dan merasa terpenggil untuk menjalankan profesinya. Ikrar ini yang dapat memperkuat tekad serta tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.
4. Profesional memiliki rasa otonomi. Mereka pun dapat membuat keputusan-keputusan, bebas untuk mengorganisasikan dalam kendala kendala fungsional tertentu.
5. Profesional mengatur dirinya sendiri. Mereka mengontrol perilakunya sendiri, namun dalam hal kerumitan kerja dan persyaratan keterampilan hanya rekan rekan sepekerjaannyalah yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.

Mengumpulkan dari beberapa literatur, Moch Syarif kemudian menggambarkan beberapa karakteristik dari sikap seorang profesional (Syarif, 2017), yaitu:

1. saat memecahkan masalah, seorang profesional melakukan pendekatan ilmiah, yakni objektif-logik, sistematis, serta dapat dibuktikan berulang kali.
2. Sikap seorang profesional diperoleh dari hasil belajar. Secara singkat, seseorang dapat disebut sebagai profesional apabila memiliki beberapa sikap berikut; a) memiliki *knowledge* atau pengetahuan yang diperlukan dalam profesi tersebut; b) memiliki *skill* atau kemampuan yang diperlukan; dan c) selalu bersikap profesional.

Sedangkan menurut Djisman Simanjuntak dalam *Pikiran Rakyat*, profesionalisme sebagai paham tidak hanya tata nilai yang dipegang oleh individu maupun organisasi melainkan juga diterapkan dalam perilakunya. (Sobur, 2001).

Mengacu pada definisi ataupun konsep di atas maka jurnalis atau wartawan dapat disebut sebagai suatu profesi. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi wartawan, sebab untuk menjadi wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai. Akan lebih mudah memahami apa itu profesionalisme jika membedakannya dengan paham paham lain yang kurang menghargai profesionalisme. Dalam mencapai suatu keberhasilan, seorang profesional akan berpegang pada keahlian dan kemampuannya yang sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya. Persaingan yang dilakukan oleh seorang profesional dilakukan dengan karya yang ia hasilkan, pelayanannya dan produknya. Sebab kaidah-kaidah profesionalisme tersebut telah teruji maka akan menghasilkan kehandalan dan kredibilitas. (Sobur, 2001).

Jadi dapat disimpulkan profesionalisme merupakan suatu paham yang digunakan untuk mengukur atau menilai sikap profesional pada khususnya dan sikap individu pada umumnya sebagai instrumen untuk mencapai tingkat

keberhasilan tertentu yang dilandasi oleh *expertise* atau keahlian, tanggung jawab atau *responsibility*, dan kesejawatan atau *corporateness*. Sedangkan profesi merupakan pekerjaan yang didedikasikan untuk masyarakat dan membutuhkan pengetahuan tinggi, serta dinaungi oleh lembaga atau organisasi profesi yang memiliki kode etik profesi.

1.3 Jurnalis Perempuan

Jurnalis, wartawan atau pewarta merupakan ujung tombak dari suatu media massa. Definisi dari profesi wartawan dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dalam UU Pers. No. 40 Tahun 1999 tentang pers dalam pasal 1 juga dijelaskan mengenai profesi ini. Dalam UU tersebut disebutkan jika wartawan adalah individu yang secara aktif melakukan kegiatan jurnalistik. (Wibawa, 2012). Organisasi pers terbesar di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan definisi wartawan dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) pasal 9. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan jika wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan jurnalistik yang berkaitan dengan mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan informasi dalam bentuk berita, pendapat atau usulan, data dan gambar melalui komunikasi massa. (Wibawa, 2012).

Terdapat tiga tingkatan wartawan yang terpapar dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 mengenai Standar Kompetensi Wartawan, ketiga tingkatan tersebut dibagi ke dalam wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Penggolongan tersebut didasari dari uji kompetensi yang telah dilakukan. Dalam uji kompetensi tersebut tiap wartawan harus memenuhi kompetensi sesuai tingkatannya. Di mana wartawan muda dituntut mempunyai kompetensi jurnalistik, wartawan madya dengan kompetensi pengelolaan jurnalistik dan wartawan utama memiliki kompetensi dalam mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.

Definisi wartawan di atas mencakup baik itu wartawan laki-laki ataupun perempuan. Hampir sama dengan definisi wartawan di atas, secara khusus jurnalis perempuan merupakan seorang individu yang melakukan pekerjaan wartawan dalam meliput di lapangan (Sulaeman, 2015).

1.4 Profesionalisme Wartawan

Seorang wartawan atau jurnalis dituntut untuk bisa profesional dalam melaksanakan tugas kewartawanannya. Namun hingga kini batasan terkait profesionalitas tersebut masih belum jelas ukurannya. Meski demikian, Septiawan Santana merumuskan beberapa atribut profesionalisme wartawan yang berdasar moral (Hamdan, 2016) diantaranya yakni:

1. Otonomi, di mana wartawan memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri baik dalam mengambil keputusan dan mengembangkan organisasi.
2. Komitmen yang bertumpu pada pelayanan umum dan bukan pada keuntungan ekonomi ataupun kepentingan pribadi.
3. Keahlian, yakni wartawan memiliki kemampuan yang unik dan esensial. Menitikberatkan pada teknik intelektual, periode panjang yang didapatkan dari latihan khusus agar memperoleh pengetahuan yang sistematis berdasar pada penelitian.
4. Tanggung jawab, yakni seorang jurnalis atau wartawan mampu memenuhi kewajiban kewajiban atau bertindak tanpa harus mendapatkan perintah dari atas, di mana seorang wartawan telah memiliki inisiatif dalam menjalankan tugasnya. Penciptaan serta penerapan suatu kode etik dalam menjalankan tugas.

Beberapa atribut moral di atas merupakan tanggung jawab yang harus dipunyai oleh seorang wartawan. Ketika seorang wartawan telah memiliki dasar moral di atas, maka diharapkan dapat menciptakan seorang wartawan yang lebih baik. Namun kemudian disadari jika moral saja tidak cukup untuk melahirkan jurnalis atau wartawan yang profesional. Seorang wartawan juga harus memiliki kecakapan

dalam hal intelektual sehingga apabila kedua unsur tersebut dapat saling melengkapi.

Sedangkan menurut Moch Lubis dalam bukunya yang berjudul *Wartawan dan Komitmen Perjuangan* menjelaskan jika tugas luhur dari seorang wartawan di titik beratkan pada aspek kejujuran. Dalam menjalankan profesinya, wartawan harus memegang teguh prinsip kejujuran. Hal ini dikarenakan upaya untuk mencerdaskan bangsa juga menjadi tanggung jawab pers (Hamdan, 2016).

Sementara itu menurut mantan wakil ketua Dewan Pers, Leo Batubara menyebutkan jika wartawan profesional adalah yang melakukan tugas jurnalistik secara teratur. Sementara itu menurut praktisi komunikasi, Troy Pantouw terdapat trilogi profesi yang harus dimiliki oleh wartawan yakni kompetensi, integritas moral dan wawasan luas (Dewanpers.or.id, 2007).

Mahi M. Himat mengutip dari buku berjudul *The Profesional Journalist* yang ditulis oleh John Hohenberg di mana dijelaskan terkait empat syarat ideal untuk menjadi seorang wartawan (M, 2018), yaitu:

1. Seorang wartawan pantang berhenti dalam mencari kebenaran.
2. Seorang wartawan yang baik tidak akan berdiam diri sehingga dikuasai zaman. Ia akan berusaha untuk berubah mengikuti perkembangan zaman.
3. Melakukan jasa-jasa yang berarti dan memberikan manfaat bagi umat manusia
4. Memelihara kebebasan agar tetap teguh.

Dari beberapa kutipan berdasarkan pendapat ahli di atas dapat diketahui jika seorang wartawan harus memenuhi sejumlah aspek untuk dapat disebut sebagai wartawan yang profesional. Tidak hanya sekedar memiliki wawasan luas tetapi juga harus dibarengi dengan memiliki moral. Semakin banyaknya aspek yang bisa dipenuhi oleh seorang wartawan, maka semakin baik dan profesionallah wartawan tersebut.

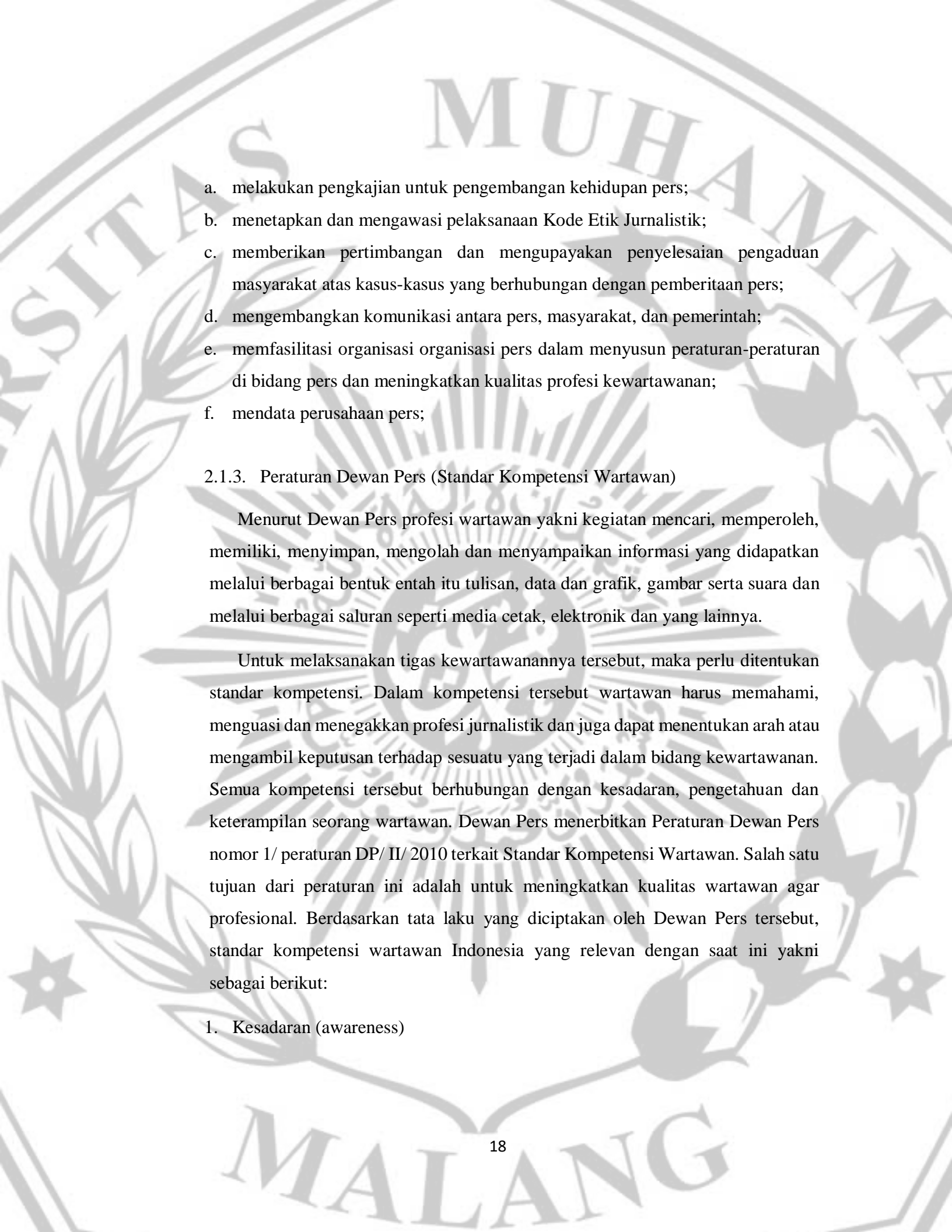
1.5 Acuan Profesionalisme Jurnalis

2.1.2. UU Pers No. 40 Tahun 1999

Sebagai wadah bagi para jurnalis, maka dipandang perlu untuk menjaga kebebasan pers. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dibuat dengan mempertimbangkan jika kemerdekaan pers juga berhubungan dan salah satu wujud dari kemerdekaan rakyat dan salah satu unsur penting dalam melahirkan suasana yang demokratis di masyarakat, bangsa dan negara. Kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers nasional sudah selayaknya mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum serta diberikan kebebasan untuk bersikap independen. Hal ini didasari karena pers nasional adalah bentuk dari komunikasi massa yang menyampaikan informasi dan membentuk opini masyarakat sehingga harus dapat menjalankan fungsi, asas, kewajiban serta perannya sebaik mungkin dilakukan dengan cara yang profesional.

Perusahaan Pers merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan atau usaha jurnalistik meliputi pencarian, pengelolaan dan penyampaian informasi dalam bentuk berita, data dan grafik atau pun dalam bentuk lainnya yang disebarkan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, dan saluran komunikasi massa lain yang tersedia . Pada Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, istilah mengenai profesi kewartawanan muncul pada Bab I, pasal 1, ayat 10, yakni: “Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.”

Undang-Undang No. 40 tahun 1999 selain untuk menjamin kemerdekaan pers, juga untuk memenuhi profesionalisme dari lembaga pers itu sendiri. Dalam Bab V, pasal 15, ayat 2, disebutkan jika Dewan Pers melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- 
- a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;

2.1.3. Peraturan Dewan Pers (Standar Kompetensi Wartawan)

Menurut Dewan Pers profesi wartawan yakni kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang didapatkan melalui berbagai bentuk entah itu tulisan, data dan grafik, gambar serta suara dan melalui berbagai saluran seperti media cetak, elektronik dan yang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas kewartawanannya tersebut, maka perlu ditentukan standar kompetensi. Dalam kompetensi tersebut wartawan harus memahami, menguasai dan menegakkan profesi jurnalistik dan juga dapat menentukan arah atau mengambil keputusan terhadap sesuatu yang terjadi dalam bidang kewartawanan. Semua kompetensi tersebut berhubungan dengan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan seorang wartawan. Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers nomor 1/ peraturan DP/ II/ 2010 terkait Standar Kompetensi Wartawan. Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas wartawan agar profesional. Berdasarkan tata laku yang diciptakan oleh Dewan Pers tersebut, standar kompetensi wartawan Indonesia yang relevan dengan saat ini yakni sebagai berikut:

1. Kesadaran (awareness)

Seorang wartawan harus memiliki kesadaran hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam menjalankan tugasnya. Garis besar mengenai kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan adalah:

a. Kesadaran etika dan hukum

Kesadaran etika sangat penting dalam profesi kewartawanan. Setiap langkah yang dipilih dalam melakukan penulisan atau menyampaikan informasi atau kejadian akan selalu berdasarkan pemikiran yang masak. Kesadaran etika juga diperlukan untuk menghindari wartawan dalam melakukan kesalahan seperti melakukan plagiasi atau menerima imbalan. Kurangnya kesadaran etika akan berpengaruh terhadap ketiadaan petunjuk moral. Pada akhirnya jika wartawan tidak memiliki kesadaran etika maka mereka tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk menghindari hal-hal semacam itu maka wartawan wajib: 1) memiliki integritas, tegas dalam prinsip dan kuat dalam nilai; 2) melayani kepentingan publik, mengingatkan penguasa agar bertanggung jawab dan menyuarakan yang tidak bersuara agar didengar pendapatnya; 3) berani dalam keyakinan, independen, mempertanyakan otoritas, dan menghargai perbedaan; 4) Memahami, melaksanakan, menerapkan serta mengedukasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) hukum, Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan pers.

Melengkapi pemahaman etika, wartawan dituntut untuk memahami dan sadar akan peraturan hukum yang berkaitan dengan kerja dan kegiatan jurnalistik yang dilakukannya.

b. Kepekaan Jurnalistik

Kepekaan jurnalistik yaitu naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap, dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

c. Jejaring dan Lobi

Dalam pelaksanaan profesi wartawan, jejaring dan lobi diperlukan untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan informasi yang kredibel, akurat, komprehensif dan terkini.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya:

a. Pengetahuan umum

Pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar tentang berbagai masalah seperti social, budaya, politik, Hukum, sejarah, dan ekonomi.

b. Pengetahuan Khusus

Pengetahuan khusus mencakup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang liputan.

c. Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik

Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik mencakup pengetahuan tentang teori dan prinsip jurnalistik dan komunikasi.

3. Keterampilan (*skill*)

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menulis, teknik wawancara, dan teknik mengedit. Wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis dan menentukan arah pemberitaan serta mahir dalam menggunakan teknologi informasi.

2.1.4. Kode Etik Jurnalistik

Jika UU Pers No. 40 tahun 1999 mengatur profesioanlisme dari lembaga pers, maka untuk mengatur profesionalisme dari jurnalis diperlukan sebuah kode etik. Menurut Tedjosaputro, pada dasarnya etika profesi merupakan seperangkat tuntutan moral yang melekat pada pelaksanaan suatu profesi. Sehingga etika profesi memperhatikan kaidah-kaidah ideal dan tanggung jawab

yang ada pada profesi tersebut. Etika merupakan usaha untuk menjabarkan suatu kejadian yang masih samar-samar serta penerapan nilai moral dalam bidang khusus yang lebih diperjelas kembali dalam kode etik. (Sobur, 2001).

Untuk mewujudkan wartawan yang profesional dalam mendapatkan informasi maka diperlukan suatu landasan moral bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya. Kemerdekaan pers tidak seharusnya menjadikan wartawan dapat menyampaikan informasi dengan seenaknya. Pedoman operasional diperlukan agar dapat menjaga kepercayaan publik serta integritas dari wartawan itu sendiri. Atas dasar inilah maka wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Dalam KEJI pasal 3 tercantum ketentuan yang harus ditaati oleh jurnalis dalam melakukan aktivitas kewartawanan:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.”

Dari pasal dalam KEJI tersebut terdapat 4 elemen yang menjadi patokan apakah jurnalis tersebut telah berperilaku profesional atau tidak. Ke-4 elemen tersebut adalah:

- 1) Menguji informasi
- 2) Memberitakan secara berimbang
- 3) Tidak mencampurkan antara fakta dan opini
- 4) Menerapkan asas praduga tak bersalah

1.6 Jurnalisme Berperspektif Gender

Konsep mengenai jurnalisme berperspektif gender kemudian muncul setelah sebelumnya jurnalisme konvensional dirasa tidak mempertimbangkan aspek-aspek sensitif gender. Jurnalisme sensitif gender merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencoba merombak pemberitaan media yang patriarki. Jurnalisme berperspektif gender tidak berkaitan mengenai moral atau pun kebenaran, tapi berhubungan dengan praktik dan masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan (Yusuf, 2004).

Subono mengartikan jurnalisme berperspektif gender atau jurnalisme sensitif gender (*gender perspective journalism*) sebagai suatu kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus menerus, baik itu dalam media cetak (seperti koran, majalah, tabloid) maupun media elektronik (radio, televisi) adanya hubungan tidak setara atau ketimpangan dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan (Yusuf, 2004).

Jurnalisme sensitif gender ini kemudian muncul karena isu gender yang kian mengemuka. Saat itu jurnalisme konvensional masih berdasar pada prinsip netral, objektif, dan apa adanya yang kemudian dianggap ikut andil dalam berbagai ketidakadilan yang dialami oleh perempuan (Yusuf, 2004).

Memodifikasi sebuah model dari buku Eriyanto, Subono kemudian membuat model yang digunakan sebagai tolak ukur apakah media tersebut melakukan jurnalisme netral gender atau jurnalisme sensitif gender. Keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut (Santi, 2007) :

Fakta	
Jurnalisme netral/obyektif gender	Jurnalisme berperspektif gender
Terdapat fakta yang nyata dan ini diatur oleh hukum-hukum/kaidah kaidah tertentu yang berlaku universal	Fakta yang ada pada dasarnya merupakan hasil dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dan ini berkaitan dengan dominasi kekuatan ekonomi-politik dan sosial-budaya yang ada dalam masyarakat
Fakta-fakta nyata yang ditemukan diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum di mana berlaku secara universal.	Berita yang terbentuk merupakan refleksi dari kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
Posisi Media	
Jurnalisme netral/obyektif gender	Jurnalisme berperspektif gender
Media adalah sarana di mana semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral, dan setara	Mengingat media umumnya hanya dikuasai kepentingan dominan (baca: patriarki), maka media seharusnya menjadi sarana untuk membebaskan dan memberdayakan kelompok kelompok yang marjinal (khususnya perempuan)
Media adalah sarana yang menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada dalam masyarakat secara apa adanya	Media seharusnya dapat digunakan sebagai alat yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok marjinal yang dalam hal ini adalah perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan menyuarkan keadilan gender.

Posisi Jurnalis	
Jurnalisme netral/obyektif gender	Jurnalisme berperspektif gender
<p>Nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/ peristiwa</p> <p>Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor yang non-partisan dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat</p> <p>Landasan moral (etis) Profesionalisme sebagai keuntungan</p> <p>Tujuan peliputan dan penulisan: pemaparan dan penjelasan apa adanya</p> <p>Jurnalis sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran</p>	<p>Nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa</p> <p>Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok kelompok marjinal (khususnya perempuan) yang ada dalam masyarakat</p> <p>Landasan ideologis Profesionalisme sebagai kontrol</p> <p>Tujuan peliputan dan penulisan: pemihakan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok marjinal, terutama perempuan</p> <p>Jurnalis memiliki posisi yang berbeda dalam kelas-kelas sosial.</p>
Hasil Liputan	
Jurnalisme netral/obyektif gender	Jurnalisme berperspektif gender
<p>Hasil liputan menampilkan dua sisi</p> <p>Bersifat obyektif, tanpa memasukkan opini</p>	<p>Hasil liputan mencerminkan pandangan jurnalis yang berperspektif gender</p> <p>Bersifat subyektif karena pemberitaan dilakukan untuk memperjuangkan hak kelompok marjinal.</p>

Penggunaan bahasa baku dalam rangka mencegah salah tafsir	Penggunaan bahasa sensitif gender
Hasil peliputan bersifat eksplanasi, prediksi, dan kontrol	Hasil peliputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif dan pemberdayaan sosial

Tabel 1: Perbedaan jurnalisme netral gender dan sensitif gender

Keempat variabel tersebut dapat dijadikan acuan mengenai bagaimana media melihat fakta, bagaimana media tersebut menempatkan dirinya di antara berbagai kelompok kepentingan, variabel ketiga yakni bagaimana jurnalis di media tersebut berusaha memosisikan dirinya dan perannya saat melakukan aktivitas kewartawanan, dan hasil akhirnya yakni bagaimana ketiga variabel tersebut memberikan efek terhadap hasil liputan yang telah dibuat. Media melakukan jurnalisme netral gender ataupun jurnalisme sensitif gender dapat dilihat dari hasil peliputan.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait jurnalisme memang telah banyak dilakukan, namun itu seputar produk dari media massa dan bukanlah perilaku dari jurnalisnya sendiri. Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan hanya sebatas sebagai tolak ukur. Dengan adanya penelitian terdahulu dapat memudahkan peneliti untuk menentukan langkah-langkah yang terorganisir dalam hal konsep dan teori dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk melihat apa yang bisa diteliti dengan cara apa. Peneliti juga dapat belajar dengan mencari tahu kekurangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan maupun melakukan penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain, dalam hal ini profesionalisme jurnalis perempuan dalam penulisan berita bias gender.

Penelitian mengenai profesionalisme wartawan telah dilakukan oleh Agus Prasetyo (2018), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, yang melakukan penelitian terkait profesionalisme wartawan dalam

menjalankan jurnalisme online (studi pada media online Saibumi.com dan Jejamo.com di Bandar Lampung). Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan studi deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika jurnalis dalam Saibumi.com dan Jejamo.com di Bandar Lampung telah cukup profesional. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah melakukan wawancara dan melakukan observasi sehingga peneliti mengambil kesimpulan jika jurnalis telah memenuhi kriteria dalam penelitian. Namun peneliti masih ada beberapa kriteria yang belum dipenuhi oleh jurnalis. Dari 6 orang jurnalis, 3 diantaranya telah memenuhi sebagai jurnalis profesional menurut kriteria dari Haris Sumadria. Sementara 3 lainnya belum termasuk sebagai profesional karena terdapat beberapa kategori yang belum terpenuhi. Seperti, belum mendapatkan gaji sesuai dengan UMR di Bandar Lampung serta belum bergabung dalam organisasi wartawan.

Dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama melihat fenomena dari profesionalisme jurnalis. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tolak ukur dari profesionalisme jurnalis. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Prasetyo mengukur profesionalisme jurnalis berdasarkan pengertian dari Haris Sumadria. Sedangkan peneliti menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai tolak ukur dari profesionalisme jurnalis. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian dari penelitian terdahulu ialah terkait profesionalisme jurnalis dalam menjalankan jurnalisme online. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini adalah mendeskripsikan perilaku dari jurnalis dalam menjalankan jurnalisme berperspektif gender.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Satriani (2017), mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dalam penelitian mengenai Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Harian Amanah Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan komunikasi penelitian yang akan dilakukan

menggunakan analisis data. Berdasarkan Teori Kesenjangan Gender dan Teori Pers Bertanggungjawab Sosial.

Dari penelitian ini menunjukkan hasil jika kebijakan bagi perempuan di harian amanah Kota Makassar setara dengan laki-laki. Jurnalis perempuan tetap mampu menunjukkan eksistensinya dalam sektor sama yang dipegang oleh laki-laki. Jurnalis perempuan dalam harian amanah dapat menduduki posisi yang sama seperti laki-laki yakni, redaktur, reporter, layouter, yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam melakukan produksi. Jurnalis perempuan di harian amanah telah mencapai titik keberhasilan dalam menjalankan tugasnya di ruang redaksi. Lebih jauh lagi, kebanyakan perempuan lah yang memiliki kontrol dalam hal penerbitan. Oleh karena itu tidak ada isu bias gender alias ketidakseimbangan gender antara laki-laki dan perempuan di harian amanah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Satriani ini dengan penelitian saat ini sama-sama melihat fenomena bias gender dalam dunia jurnalistik. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus penelitian di mana penelitian terdahulu fokus pada ruang redaksi. Di mana penelitian yang dilakukan oleh Satriani melihat apakah terdapat isu bias gender yang dialami oleh jurnalis perempuan dalam harian amanah Kota Makassar. Sementara, penelitian yang peneliti lakukan fokus terhadap perilaku dari jurnalis perempuan dalam melakukan penulisan berita bias gender. Perilaku profesionalisme jurnalis perempuan tersebut berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik.

Perbedaan dari ketiga hasil penelitian tersebut dengan judul penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan serta subjek sebagai variabel dari penelitian. Secara lebih jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dipaparkan dalam tabel berikut:

Nama	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Subjek
Penelitian Terdahulu			

Agus Prasetyo	profesionalisme wartawan dalam menjalankan jurnalisme online (studi pada media online Saibumi.com dan Jejamo.com di Bandar Lampung)	Mengetahui profesionalisme dari media online Saibumi.com dan Jejamo.com dalam melaksanakan prinsip jurnalisme online	Studi deskriptif Saibumi.com dan Jejamo.com
Satriani	Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Harian Amanah Kota Makassar	Mengetahui peran serta posisi jurnalis perempuan di keredaksian media Harian Amanah Kota Makassar	Catatan lapangan yang dibuat ketika observasi dan dokumen organisasi
Penelitian Saat Ini			
Patayatul Wahidah	Profesionalisme Jurnalis Perempuan dalam Penulisan Berita Bias Gender (Studi Kasus Terhadap Jurnalis Perempuan di Kota Malang)	Mengetahui profesionalisme dari jurnalis perempuan di Kota Malang dalam penulisan berita bias gender	Jurnalis perempuan di Kota Malang

Tabel 2: Penelitian Terdahulu